



Penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu

Muhammad Fardh'lu Rizky¹, Dadang Mashur²

¹Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau

²Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Riau

Abstract

Received: 10 Agustus 2022

Revised: 13 Agustus 2022

Accepted: 18 Agustus 2022

Village Sustainable Development Goals are an integrated effort for economic, social, environmental, legal and community governance development at the village level. With the use of the 2021 village funds, which are prioritized to finance activities that support the achievement of the Village SDGs. This study uses the Visseren-Hamakers theory based on 3 aspects, namely economic aspects, social aspects, environmental aspects, and institutional aspects. The purpose of this study is to analyze how far the Sungai Parit Plantation village government has implemented the 18 Village Sustainable Development Goals in implementing development in the village. This study uses qualitative research methods with collecting techniques by observation, interviews, and documentation. The results of this study are that several village SDGs goals have been implemented in Sungai Parit Plantation village, but have not been 100% realized due to several problems, such as: Covid-19 pandemic, lack of understanding of the Sungai Parit Plantation village community towards SDGs, lack of quality human resources in carrying out programs, village SDGs program and intolerance among certain groups so that cooperation is difficult in the Sungai Parit Plantation village

Keywords: Development, Sustainable Development Goals, Country Side

(*) Corresponding Author: Muhammad.fardhlu1829@student.unri.ac.id

How to Cite: Rizky, M., & Mashur, D. (2022). Penerapan Sustainable Development Goals Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 385-394. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7049684>

PENDAHULUAN

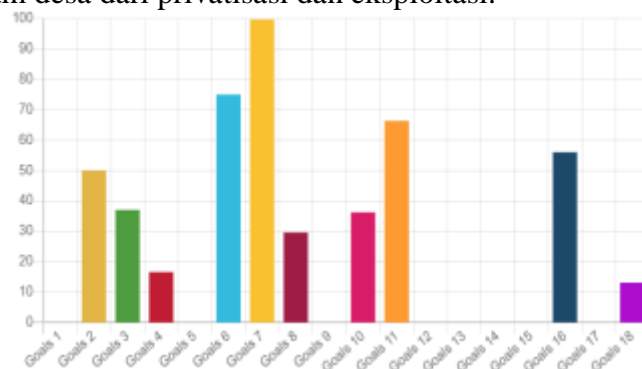
Saat ini, kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan Zaman di saat suatu gagasan mampu mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global, menyangkut masalah kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di dunia ketiga. Istilah pembangunan (*development*) kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua Negara, khususnya Dunia Ketiga. Bahkan dewasa ini aneka ragam pendekatan pembangunan banyak dimunculkan sebagai pemikiran untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SDGs adalah sebuah proposal pembangunan bangsa-bangsa yang merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari proposal pembangunan terdahulu yang terkenal dengan nama *Millenium Development Goals* (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium. Proposal itu berisi tujuan-tujuan pembangunan dan target-target yang hendak dicapai, dalam mana tujuan-tujuan dan target-target itu merupakan tanggapan terhadap isu-isu krusial atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, seperti isu kemiskinan, kematian ibu dan bayi, air dan kebersihan, dan yang lainnya.



Pemerintah Indonesia merespon dengan SDGs dalam Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) oleh Presiden Joko Widodo. TPB dikelompokkan dalam empat Aspek: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola yang ditopang dengan prinsip kemitraan dan partisipasi para pihak.

Dengan demikian, mendaratkan SDGs desa hingga tingkat tapak merupakan langkah strategis. Setidaknya untuk 2 hal, pertama, SDGs Desa menjadi kendaraan untuk memunculkan karakter budaya nusantara sebagai pijakan paradigma. SDGs Desa dapat menggalang kekuatan untuk mempertahankan identitas Indonesia di tengah deraan globalisasi yang membatasi dan merelatifkan kedaulatan negara serta hegemonik terhadap alam. Kedua, SDGs Desa menjadi tameng perlindungan sumberdaya alam desa dari privatisasi dan eksploitasi.



Gambar 1.1

Grafiik Penilaian SDGs Desa di Desa Perkebuan Sungai Parit

Untuk mengetahui sejauh mana dan apakah proses-proses adopsi, perencanaan dan pelaksanaan SDGs sudah terealisasi dibuatlah sistem skor dari angka 0-100 dan menilai empat aspek-aspek *Sustainable Development Goals*. Berikut penjelasan skor skala dalam angka 0-100:

1. Belum (1-25)

Daerah masih belum fokus pada pencapaian SDGs, dan masih belum berkomitmen untuk pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan upaya khusus untuk mempercepat pencapaian SDGs melalui perubahan-perubahan kebijakan dan program untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan.

2. Komitmen (26-50)

Daerah mulai memperhatikan dan menunjukkan komitmen untuk pencapaian SDGs. Hal ini ditunjukkan dengan dimulainya menyusun rencana aksi daerah (RAD) Dan upaya khusus mempercepat pencapaian SDGs dengan cara membuat perubahan-perbaikan untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan.

3. Melakukan (51-75)

Daerah telah memperlihatkan komitmen dan telah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian SDGs. Walau demikian, masih dibutuhkan upaya-upaya lain untuk mencapai tahapan yang lebih baik untuk memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi masyarakat. Begitu juga dengan upaya khusus untuk mempercepat pencapaian SDGs untuk membuat perubahan-perubahan demi meningkatkan keadilan dan kesejahteraan.

4. Telah Melaksanakan (76-100)

Daerah telah memperlihatkan komitmen dan telah melaksanakan berbagai upaya inovatif untuk pencapaian SDGs. Upaya tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain, untuk penerapan dan pelaksanaannya guna memastikan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat bagi masyarakat. Serta dan upaya khusus untuk mempercepat pencapaian SDGs untuk membuat perubahan-perubahan untuk peningkatan keadilan dan kesejahteraan.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil penelitian ini seperti mencari data, mengumpulkan data, mengolah maupun menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) terhadap percepatan pembangunan Nasional. Maka, dengan ini peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Percepatan Pembangunan Nasional Melalui SDGs, Kasus Desa Perkebunan Sungai Parit”

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menentukan hasil penelitian ini seperti mencari data, mengumpulkan data, mengolah maupun menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL & PEMBAHASAN

Implementasi Program Kartu *Smart Madani*

Berdasarkan Model *Sustainable Development Goals* (SDGs) Visseren Hamakers ada empat variable yang dapat mengukur pencapaian program SDGs. Aspek-aspek sebagai berikut: 1) Ekonomi, 2) Sosial, 3) Lingkungan, dan 4) Lembaga. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat Percepatan Pembangunan SDGs di Desa Perkebunan Sungai Parit dalam mewujudkan 18 Tujuan SDGs yang dilihat berdasarkan variable-variabel tersebut. Berikut merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan. Keempat variable tersebut merupakan variable yang sangat penting untuk menilai sejauh mana proses implementasi SDGs desa dalam Permendesa PDTT No.13 Tahun 2020 yang dilakukan oleh desa Perkebunan Sungai Parit

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana pembangunan global yang terkenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) menurut Visseren Hamaker adalah sebuah dokumen yang menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara dengan memperhatikan Manusia dan Lingkungan. (Pearce and Warfrod: 1993, 23) Konsep dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang dengan mempertimbangkan Aspek-Aspek dalam pembangunan, yaitu : 1) Ekonomi, 2) Sosial, dan 3) Lingkungan. Program ini sudah lama disahkan oleh PBB pada tahun 2015, namun akibat perbedaan di setiap negara, baik itu budaya, ekonomi, social, geografis dan lain-lain mempengaruhi terlaksananya program SDGs.

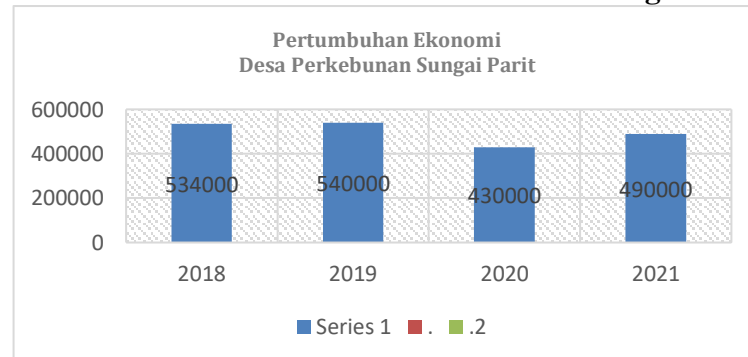
1. Aspek Sosial

Keberhasilan *Sustainable Development Goals* (SDGs) bukan hanya berfokus kepada aspek ekonomi, namun juga bergantung pada aspek social. Adapun Aspek-Aspek pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan social yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan. Untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis konsep pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, serta faktor apa saja dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangun secara berkelanjutan (*sustainable development*).

Tujuan ini sesuai dengan program SDGs yaitu desa tanpa kemiskinan (SDGs 1), desa tanpa kelaparan (SDGs 2), desa sehat dan sejahtera (SDGs 3), desa berpendidikan (SDGs 4), dan desa keterlibatan perempuan (SDGs5). Program yang telah dilaksanakan tidak 100% berhasil dilaksanakan, namun diberikan skor oleh Sistem Informasi Desa (SID), dimana semakin besar skor yang diberikan menunjukkan semakin tercapainya goals SDGs Desa.

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi Desa Perkebunan Sungai Parit



Dari data diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat di Desa Perkebunan Sungai Parit masih tergolong rendah dan pada masa pandemic pendapatan turun sekitar 20% akibat pandemic yang terjadi. Sehingga pemerintah desa Perkebunan Sungai Parit harus dapat mengatasi hal ini dan menemukan solusi. Dalam mengimplementasikan program ini perlu Kerjasama antar masyarakat, Dengan tujuan ini pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai pihak menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender. Pada tahun 2030, Tujuan SDGs Desa adalah terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Selain memberikan perlakuan yang adil, dibuka kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan desa. Tercapainya tujuan SDGs Desa ini juga menyaratkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

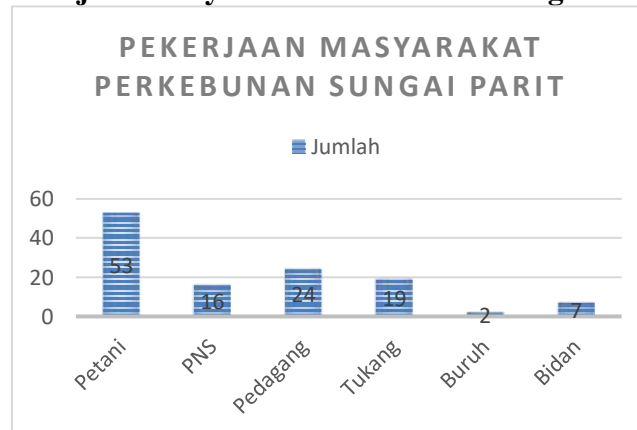
Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit dalam Aspek Sosial masih belum terlaksana sepenuhnya. Dari 5 tujuan dari aspek social, pemerintah desa Perkebunan Sungai Parit masih belum bisa melaksanakan program 100% dan program ini masih dalam tahap perencanaan yang dimana, masih belum 100% dilaksanakan dilapangan atau hanya beberapa dari sekian program yang telah disusun.

2. Aspek Ekonomi

Ekonomi diperlukan untuk melaksanakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara menyeluruh. Ekonomi sangat penting untuk pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Visseren Hamakers dalam Zaini (2021) Untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk usia kerja di seluruh dunia dengan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan, tidak hanya akan menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Ini merupakan lingkaran positif yang baik bagi perekonomian maupun bagi masyarakat serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja, terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa, tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.

Grafik 1.2
Pekerjaan Masyarakat Perkebunan Sungai Parit



Pemerintah desa perkebunan Sungai Parit menargetkan berinovasi setiap tahun untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa sehingga tidak ada pengangguran dan mengurangi kriminalitas, serta mengatasi perubahan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Salah satu Inovasi dalam melaksanakan *Sustainable Development Goals* adalah dengan pembentukannya Koperasi Jaya yang berfokus kepada penjualan bibit di desa Perkebunan Sungai Parit. Ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, serta menolong petani dalam meningkatkan produktivitas.

Walaupun telah dilaksanakan program dan membuat beberapa solusi. Peneliti masih melihat bahwa kesenjangan di masyarakat desa Perkebunan Sungai Parit. Dikarenakan pemerintah desa masih membantu atau membuat program bagi petani, sehingga penghasilan petani desa dan pekerjaan lain berbeda sangat jauh. Ini membuat kesenjangan di desa terlihat sangat signifikan dan tidak sejalan dengan SDGs Desa ke 10, yaitu Desa tanpa kesenjangan.

Beberapa informan yang didapatkan bahwa implementasi program *Sustainable Development Goals* Desa dalam aspek Ekonomi masih belum terlaksana di Desa Perkebunan Sungai Parit. Akibat program BUMdesa untuk membantu petani, terdapat kesenjangan antar pekerjaan di Desa Perkebunan Sungai Parit.

Dikarenakan hal ini hanya dapat dirasakan oleh para petani. Ini sangat berbanding terbalik dengan tujuan SDGs 8 (Pertumbuhan Ekonomi yang merata), dimana fokus dalam pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian dan tidak pada sektor lain. Ini membuat SDGs 9 (Infrastruktur dan Inovasi Desa) dan SDGs 10 (Desa Tanpa Kesenjangan) tidak dapat terlaksanakan. Dikarenakan kesenjangan antara petani dan pekerja lain sangat jauh dalam hal pendapatan dan kurangnya Inovasi dari desa Perkebunan Sungai Parit dalam mengatasi hal ini, membuat infrastuktur disana berfokus pada wilayah pertanian.

3. Aspek Lingkungan

Aspek Lingkungan merupakan aspek penting dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Fokus dalam aspek ini adalah bukan berfokus kepada generasi sekarang, tetapi untuk generasi ke depannya. Program-program *Sustainable Development Goals* Desa dalam aspek social, ialah :1. SDGs 6 (Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi), 2. SDGs 7 (Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan), 3. SDGs 11 (Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Sejahtera), 4. SDGs 13 (Desa Tanggap Perubahan Iklim), 5. SDGs 14 (Desa Peduli Lingkungan Laut), 6. SDGs (Desa Peduli Lingkungan Darat). Dari 6 Program beraspek lingkungan, Desa Perkebunan Sungai Parit baru menjalankan 3 dari 6 program, yaitu SDGs 6 (Desa Layak Air Bersih) dengan skor 75, SDGs 7 (Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan) dengan skor 99.68 dan terakhir SDGs 11 (Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Sejahtera) dengan skor 66.35

Pertama, SDGs menganut model keberlanjutan mutakhir, bukan lagi Aspek (yang melihat ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpisah) atau triple bottom line (yang melihat adanya peririsan di antara ketiganya), melainkan model nested (yang melihat hubungan ketiganya secara komprehensif: ekonomi bagian dari sosial, dan sosial bagian dari lingkungan).

Kedua, dalam bentuk konseptualnya yang formal, lingkungan dinyatakan sebagai salah satu di antara 6 elemen esensial SDGs, yaitu: planet, people, dignity, prosperity, justice, dan partnership.

Ketiga, bentuk konseptual tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam 17 Tujuan dan 169 Target. Lingkungan terutama diuraikan dalam Tujuan 12 (produksi dan konsumsi), Tujuan 13 (perubahan iklim), Tujuan 14 (lautan) dan Tujuan 15 (daratan). Namun juga sangat jelas terkait dengan Tujuan 6 (air dan sanitasi, terutama bagian pengelolaan sumberdaya air), Tujuan 7 (energi), Tujuan 9 (infrastruktur, industrialisasi dan inovasi) dan Tujuan 11 (kota dan pemukiman).

Keseriusan pemerintah desa Perkebunan Sungai Parit dalam mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun masih belum dapat melaksanakan program beraspek lingkungan secara spesifik, seperti Desa energi bersih dan terbarukan (SDGs 7) konsumsi produk Desa sadar lingkungan (SDGs 12), Desa tanggap iklim (SDGs 13), Desa Peduli Lingkungan Laut (SDGs14), Desa Peduli Lingkungan Darat (SDGs 15).

Ini memberikan penegasan bahwa masih kurang daya dukung masyarakat dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam Desa yang dipergunakan untuk membangun kondisi masyarakat yang bermartabat, juga bentuk ekonomi yang berkeadilan. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk logika pembangunan yang selama ini bukan saja merusak lingkungan, namun juga menghasilkan peminggiran sosial, juga ketidakadilan ekonomi. Sedangkan SDGs ingin memperbaiki itu semua lewat logikanya, ditambah dengan penekanan bahwa hal tersebut ingin dicapai melalui kemitraan antar-negara dan antar-sektor.

Terakhir, dengan mengandaikan Pemerintah RI bersungguh-sungguh ingin mencapai keberlanjutan melalui SDGs, jelas akan dibutuhkan berbagai penyesuaian dalam kebijakan pembangunan. Sektor-sektor ekonomi akan ditentukan peta jalannya dengan pertimbangan keberlanjutan/SDGs. Sektor-sektor yang menghambat atau bertentangan dengan SDG. Transisinya sendiri perlu dibuat dengan mulus, terutama agar seluruh dampak ekonomi-sosial-lingkungan bisa terkendali, terlebih lagi untuk melindungi kepentingan kelompok masyarakat rentan. Tetapi, kapan sektor-sektor ekonomi hitam itu hilang dari Indonesia haruslah dinyatakan dengan tegas.

4. Aspek Kelembagaan

Agar Kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), menurut Visseren Hamakers (2020:59) tujuan mendaratkan konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) agar derap pembangunan tidak lenyap akibat pengukuran bersikap global dan nasional. Sehingga memudahkan komunikasi desa, dalam melakukan pembangunan dan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Contohnya, kekhasan elan vital religi dan kesalehan sosial perlu diunggulkan. Begitu pula kinerja lembaga-lembaga khas yang muncul di desa-desa di Indonesia, seperti Badan Usaha Milik Desa. Dari kebutuhan inilah kemudian dirumuskan SDGs Desa ke 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Kelembagaan adalah salah satu cara dalam merealisasikan pembangunan di desa. Pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa mencakup seluruh aspek pelokalan yang sudah pernah dilakukan. Seluruh tujuan dalam SDGs yang telah diindonesiakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, selanjutnya dilokalkan ke level desa dalam SDGs Desa. Penggunaan bahasa penting: menjadi harus sederhana, merujuk pada pernyataan tujuan, dan rasional untuk dipenuhi (jika pembangunan dijalankan).

Dapat diketahui bahwa Permendesa PDTT No.13 Tahun 2020 tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs) di desa. Kelembagaan di desa dalam tujuan kemitraan pembangunan Desa (SDGs 17), Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif (SDGs 18). Koordinasi yang dilakukan oleh kelembagaan, baik formal atau adat masih kurang di Desa Perkebunan Sungai Parit di nilai masih kurang atau pasif. Contohnya, saat ingin melakukan pembangunan di Desa, Kelembagaan dan kepala adat tidak ikut serta dalam musyawarah dan kurangnya pengetahuan tentang peran kelembagaan dan kepala adat di Desa Perkebunan Sungai Parit dalam pembangunan. Sehingga untuk tujuan ke 17 dan 18 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Desa Perkebunan Sungai parit belum terealisasikan dengan baik.

FAKTOR PENGHAMBAT

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di desa Perkebunan Sungai Parit. Dalam Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 masih terjadi hambatan. Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang *Sustainable Development Goals* bahwa kelembagaan dan pemuka adat di Desa Perkebunan Sungai Parit masih belum bisa menunjukkan sifat bekerja sama dalam mengimplementasikan 18 program *Sustainable Development Goals* (SDGs). Belum Optimalnya perencanaan *Sustainable Development Goals* Desa, diketahui bahwa terjadi hambatan dalam merancang perencanaan pembangunan khususnya program *Sustainable Development Goals* Desa di desa Perkebunan Sungai Parit. Dimana musyawarah yang bukan hanya melibatkan pemerintah desa, namun juga masyarakat desa masih tidak bisa terlaksana. Permasalahan ini sangat dirasakan oleh pemerintah desa, sehingga berdampak kepada perencanaan pembangunan di Desa. Mengakibatkan perencanaan yang dilakukan di desa tidak sepenuhnya berasal dari Musyawarah, namun berdasarkan keputusan satu pihak. Kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia Desa, Kualitas sumber daya manusia dalam ini kemampuan pintelektual (kecerdasan) sehingga menghambat meningkatkan pembangunan Desa Perkebunan Sungai Parit. Tidak memiliki kemampuan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, maka menghambat peningkatkan pembangunan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Percepatan Pembangunan Nasional Melalui *Sustainable Development Goals* Di Kecamatan Sungai Lala, Desa Perkebunan Sungai Parit, serta permasalahan dalam pengimplementasian *Sustainable Development Goals* di Desa Perkebunan Sungai Parit. Dalam penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit telah melaksanakan 10 dari 18 tujuan. Dimana pencapaian *Sustainable Development Goals* desa di Desa Perkebunan Sungai Parit masih belum terlaksana 100%, dengan rata-rata penilaian yang didapatkan 43.60 dan tidak semua tujuan *Sustainable Development Goals* terlaksana. Ada yang memiliki penilaian tertinggi dengan nilai 99.68 dan penilaian terendah 16.59. penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit, yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang *Sustainable Development Goals*, Belum Optimalnya perencanaan *Sustainable Development Goals* Desa, dan Kurangnya Kualitas Sumber Daya di Desa Perkebunan Sungai Parit.

Partisipasi berbagai pihak dibutuhkan dalam upaya memberikan kontribusi yang positif bagi *Sustainable Development Goals* Desa. Sehingga Desa Perkebunan Sungai Parit dapat melaksanakan 18 tujuan *Sustainable Development Goals* Desa. Walaupun begitu, pemerintah desa Perkebunan Sungai Parit tidak harus terburu-buru dalam melaksanakan *SDGs* Desa. Benar sasarannya pada tahun 2030 *Sustainable Development Goals* harus bisa terlaksana, namun tidak mudah kenyataannya atau praktik di lapangan untuk menerapkan semua 18 tujuan. Sehingga pemerintah desa Perkebunan Sungai Parit harus dapat sedikit demi sedikit merealisasikan tujuan yang belum terlaksana. Penerapan 18 tujuan *Sustainable Development Goals* Desa di desa Perkebunan Sungai Parit memerlukan bantuan dan pemahaman yang sama tentang visi dan misi pemerintah desa menuju tujuan

Sustainable Development Goals. Persamaan pemahaman ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan bimbingan teknis atau kegiatan lainnya tentang pelaksanaan fungsi, antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Sehingga Hambatan penerapan *Sustainable Development Goals* Desa di Desa Perkebunan Sungai Parit, yaitu Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang Sustainable Development Goals, Belum Optimalnya perencanaan Sustainable Development Goals Desa, dan Kurangnya Kualitas Sumber Daya di Desa Perkebunan Sungai Parit

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhi Yusuf, H. S. (2019). Analisis Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 67-84.
- Armida Salsiah Alisjahbana, E. M. (2018). *Tujuan pembangunan berkelanjutan di indonesia*. Bandung: Unpad Press .
- Didik Suharjito, H. R. (2013). *Pembangunan Kehutanan Indonesia Baru Refleksi Dan Inovasi*. Bandung: Percetakan IPB.
- Dr. Syahra Anggara, M. L. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori Dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Etika Khairina, E. P. (2020). Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Ajree Ducol Malawani*, 155-181.
- Hakim, Lukman EM. 2011. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media
- Hamakers, Visseren. 2020. *The 18th Sustainable Development Goal*. the Netherlands: Earth System Governance
- Heal, G. 1998. Valuing The Future : *Economic Theory And Sustainability*. Columbia University Press. New York.
- Ichsan, A. I. (2019). Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan . *JOM FISIP*, 1-10.
- Kusmanto, Heri. 2013. Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik.
- Labuhanbatu, E. P. (2017). *Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Ppip) Di Desa Telaga Suka Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu*. Medan.
- Moeloeng, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Oksana1, M. I. (2012). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap sifat Kimia Tanah. *Jurnal Agroteknolog*, 29-34.
- Rama, M. N. (2017). Pembinaan Dan Pengendalian Kawasan Hutan . *Jom Fisip*, 1-15.
- Rihman Maha, R. M. (2018). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Kawasan Hutan Terhadap. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 318-329.
- Siagian. S. P. 1983, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi Dan Strateginya*, Jakarta, PT Gunung Agung.
- Sidik, Fajar. 2015. Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*. Vol 19 No 2 (2015). Hal. 115- 131

- Suprianto, F. D. (2020). Studi Literatur: Hutan Desa Namo Sebagai Hutan Pendidikan Dalam Menuju . *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 96-105.
- Syahril, H. N. (2021). Integrasi Perkebunan Sawit Dan Peternakan Sapi Di Desa Teupin Panah . *Jurnal Pengabdian Agro Dan Marine*, 11-15
- Siagian. S. P. 1983, *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi Dan Strateginya*, Jakarta, PT Gunung Agung.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 13/2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018, Tentang Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan.
- Perda Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa Berkelanjutan
- Perda Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Rencana Pembangunan Berkelanjutan